

POLA PERKEMBANGAN *SLUMP* DAN *SQUATTERS* DI DESA BANYUDONO

ENDRA RIZKY GEMELLIO HADINAGORO

Program Studi Arsitektur
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Debauchery.tea.party@gmail.com

Qomarun

Program Studi Arsitektur
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Qomarun@ums.ac.id

ABSTRAK

Kondisi pemukiman yang tidak terkendali di bantaran sungai Kelurahan Banyudono membuat pemukiman di bantaran sungai menjadi kumuh. Seluruh bantaran sungai Kalimati dikategorikan kumuh sehingga sebenarnya bantaran sungai merupakan aset Desa Banyudono, sebaliknya justru hal ini merupakan wajah buruk bagi Desa.

Program dan penataan struktur permukiman kumuh di Kelurahan Banyudono memang sudah dilakukan, namun pada dasarnya belum berhasil dikelola secara utuh. Identifikasi karakteristik permukiman kumuh bantaran sungai perlu dilakukan untuk mengetahui aspek dan variabel yang mempengaruhi permukiman kumuh bantaran sungai untuk kemudian dirumuskan konsep penataan yang sesuai dan dapat diimplementasikan pada permukiman kumuh bantaran sungai di lokasi penelitian.

Terbentuknya permukiman liar di sempadan sungai Kalimati dukuh Kaligoro desa Bayudono Boyolali berawal bantuan pembangunan rumah di sekitar bantaran sungai lalu warga memiliki inisiatif sendiri dan berlangsung lambat. Mengurangi permukiman liar dapat dilakukan dengan: lebih mawas pada lahan-lahan kosong yang berpotensi menjadi permukiman, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan desa secara maksimal untuk menekan angka urbanisasi.

KEYWORDS: Pemukiman Kumuh, Sungai, Desa Banyudono

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk tiap Tahun meningkat sangat pesat membuat laju pertumbuhan penduduk di desa Banyudono tidak terkendali, sehingga meningkatnya juga permintaan jumlah tempat tinggal.

Tingginya harga untuk membeli suatu lahan menyulitkan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum miskin untuk memperoleh perumahan formal yang layak sebagai tempat tinggal. Pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perumahan kaum miskin. Oleh karenanya, masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum miskin membangun rumah secara swadaya di lahan yang rawan bencana atau daerah pinggir kota dengan kemampuan ekonomi yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa adanya pendampingan dalam perencanaan, pelayanan dasar, legalitas kepemilikan lahan atau pengakuan dari aparat.

METODOLOGI

Metode yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif observatif. Karena dengan menggunakan metode deskriptif dapat mengamati dan menggambarkan fenomena – fenomena yang ada dan yang sedang berlangsung saat ini. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau mengubah pada variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

LANDASAN TEORI

Perkembangan merupakan proses pembangunan suatu lahan secara kontinyu (Yunus, 2010). Perkembangan permukiman merupakan suatu fenomena keruangan, karena permukiman merupakan salah satu contoh dari arti ruang (space) secara absolut, yang bersifat riil, maujud/kasat mata dan dapat

diamati secara langsung maupun tidak langsung di permukiman bumi. Dalam hal ini perkembangan permukiman berkaitan dengan proses spasial.

Permukiman liar (*squatter*) adalah suatu kawasan ilegal yang dijadikan permukiman oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah. Sedangkan permukiman kumuh (*slum*) adalah suatu kawasan yang telah mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, sosial-ekonomi, maupun sosial-budaya, dan tidak tercapainya kehidupan yang layak. Permukiman liar lebih mengacu pada legalitas suatu lahan yang dijadikan area permukiman oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Karena lahan yang digunakan adalah bukan miliknya atau bukan haknya atau digunakan tanpa izin dari pemilikinya. Sedangkan permukiman kumuh lebih mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Karena biasanya slum area diwarnai dengan: tingkat pendapatan yang rendah dari penduduknya, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah dan tingkat privasi antar keluarga yang juga sangat rendah. Semakin bertambahnya permukiman liar di suatu kawasan, potensi untuk menjadi kawasan kumuh pun sangat besar.

Terbentuknya permukiman liar tersebut dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman liar antara lain

1) Pertumbuhan ekonomi yang lambat

Pertumbuhan penduduk yang pesat jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi negara yang juga pesat akan berdampak kepada munculnya tingkat kemiskinan rakyat. Situasi itu memaksa rakyat mendekati sentra perekonomian di kota-kota besar tanpa memperhitungkan akan dimana mereka bermukim. Dalam benak mereka, berteduh adalah masalah yang tidak perlu ideal yang terpenting mereka bisa makan dan bertahan hidup, di kolong jembatan, pinggir kali, bahkan pinggiran rel kereta api sekalipun.

2) Peraturan pemerintah kota yang setengah hati

Seharusnya pemerintah kota sudah bisa membagi-bagi area kota sesuai peruntukannya. Pembagian area kota sesuai

tata ruang tersebut semestinya didukung dengan perundangan yang tegas. Jika sebuah area belum dapat dibangun sesuai peruntukannya maka jangan sampai wilayah tersebut dipakai sementara untuk peruntukan lainnya, apalagi membiarkan pihak lain secara ilegal menggunakan lahan kosong tersebut. Banyak area kosong dibiarkan oleh Dinas Tata Kota dan ditempati oleh penduduk yang datang musiman. Setelah sekian lama, mereka bisa membuat KTP bahkan dilayani oleh PLN untuk penyambungan listrik secara resmi.

3) Program pembangunan perumahan rakyat yang tak berjalan mulus

Pemerintah melalui dinas terkait selayaknya mempunyai program pintar dalam menyediakan fasilitas perumahan dan permukiman bagi rakyat. Program tersebut haruslah bijaksana dan menyentuh seluruh kemampuan strata ekonomi rakyat. Setiap perkotaan tentu akan berbeda dalam programnya, hal itu tergantung dari tingkat ekonomi kerakyatan yang dominan di kota tersebut.

4) Sosial ekonomi

Pada umumnya banyak penduduk yang mempunyai tingkat pendapatan rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Pendapatan yang rendah ini mempengaruhi daya beli penduduk dan mengurangi akses pelayanan sarana dan prasarana dasar penduduk. Ketidak mampuan sosial ekonomi dapat mendorong masyarakat menempati lahan milik pemerintah atau milik publik yang dapat dikatakan sebagai hunian ilegal atau liar.

5) Pendidikan dan keahlian

Pendidikan dan keahlian adalah salah satu faktor penentu dalam hal pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Banyak migran tidak dapat bekerja dengan standar yang ditetapkan karena pendidikan dan keahlian yang dimilikinya rendah. Persaingan dalam mencari pekerjaan sangat tinggi dan menuntut profesionalisme, pendidikan dan keahlian yang berstandar serta dapat bersaing dengan orang lain, dampak dari akumulasi kejadian ini akan memunculkan pengangguran yang semakin bertambah setiap tahunnya.

6) Pengawasan tanah kurang ketat

Pengawasan tanah yang kurang ketat merupakan penyebab bertambahnya permukiman liar di perkotaan, karena banyaknya lahan kosong di perkotaan yang dibiarkan begitu saja, padahal sebenarnya sudah direncanakan akan dibangun suatu gedung untuk mendukung kegiatan suatu kota.

7) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum yang menyebabkan mereka membangun rumah sembarangan. Mereka tidak mengetahui akibat dari yang mereka lakukan itu membuat lingkungan menjadi kotor dan bahkan merugikan banyak pihak.

8) Ketersediaan lahan

Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka, terlebih di wilayah perkotaan dan lahan merupakan suatu komponen pokok pembangunan fisik di wilayah perkotaan yang ketersediaannya semakin terbatas seiring dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Dengan harga lahan yang tinggi, mereka yang berpenghasilan rendah tidak sanggup membeli rumah karena harga rumah sekarang ini cukup mahal.

Sebagaimana yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Thn. 2015 Nomor 28 Pasal 22 adalah:

1. Sempadan Sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk :
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, andra lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - f. bangunan ketenagaan listrik.
2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. Menanam tanaman selain rumpaut;
 - b. Mendirikan bangunan; dan

c. mengurangi dimensi tanggul

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 26 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman :

1. Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.;
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi diterbitkannya izin mendirikan bangunan.;
3. Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan perumahan dan/atau permukiman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian terletak di dukuh Kalisari desa Banyudono kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah.



Gambar 1. Letak dukuh Kalisari
(sumber : google earth)

 = Dukuh Kalisari

Hasil Kusioner

Kusioner digunakan untuk menghasilkan data tentang pandangan seseorang sebelum dan sesudah adanya *slump* dan *squatters* desa Banyudono, kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali. Responden diberikan untuk mengetahui kehidupan masyarakat yang ada di dukuh Kaligoro serta gambaran kondisi sebelum dan sesudah adanya *slump* dan *squatters* desa Banyudono, kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali kemudian ditanggapi didalam lembar kusioner , dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah di paparkan oleh penulis.

Dari hasil dari rekapan kusioner, dapat di simpulkan bahwa masyarakat yang ada di dukuh Kaligoro Rt 04 /Rw 02 merupakan pendatang yang berasal dari daerah Purwodadi, Sragen, dan daerah lainnya. Mata pencaharian mereka pada umumnya serabutan (tidak tetap). Jumlah anggota keluarga pada tiap rumah berkisar antara 4-5 orang. Penghasilan rata-rata mereka berkisar antara 1.350.00 – 3.600.000 setiap bulan. Warga yang ada di dukuh Kalisari tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan dan belum pernah mengalami penggusuran rumah. Mereka tidak nyaman dengan kondisi rumah mereka saat ini. Luas bangunan tiap rumah yang ada di dukuh Kalisari rata-rata berukuran 12-15m² , persediaan air mereka untuk kebutuhan sehari hari berasal dari sumber mata air.

Hasil Wawancara

Dari wawancara dengan responden dihasilkan kesimpulan bahwa pada tahun 1980 kepala desa Banyudono pada saat itu bapak Sutono ingin menata desa Banyudono menjadi lebih baik. Pada saat itu bapak Sutono diberikan tawaran bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Boyolali terkait masalah gelandangan dan pengemis berupa beberapa rumah di dekat bantaran sungai Kaligoro. Pada saat itu dari pihak pemerintah desa menyetujuinya dan di buatkan hanya 10 rumah tinggal. Moral yang ada di dukuh Kalisari juga terbilang sangatlah buruk pada awalnya. Sering terjadi cekcok antara dukuh Kalisari dengan dukuh yang lain. Masyarakat sekitar Kalisari sering mengeluh kepada pemerintah desa Banyudono yang mana warga yang berada di dukuh Kalisari sering melakukan tindakan anarkis. Pada tahun 2017 pemerintah desa Banyudono mulai mengadakan penyuluhan sosial kepada warga dan masyarakat dukuh Kalisari.

Dokumen Lapangan (Foto)



Gambar 2. Penampakan Rumah warga yang langsung dekat dengan sungai (sumber : data pribadi)



Gambar 3. Kondisi Dukuh Kalisari yang padat (sumber : data pribadi)

Kompilasi Regulasi (Peraturan)

Penanganan instan dari pemerintah secara sepihak dengan membuat peraturan yang ada membuat rancu dalam penanganan gelandangan dan pengemis dengan peraturan atau hukum yang ada. Hal ini dapat di jelaskan pada Lampiran I Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 :

1. Sempadan sungai di kawasan yang berkembang menjadi kawasan perkotaan (misalnya) akan mengalami tekanan besar dalam hal penggunaan lahan. Tekanan itu berupa pemakaian lahan sempadan untuk peruntukan permukiman dan peruntukan lain baik legal maupun ilegal.

2. Ruas sungai tertentu dapat menimbulkan keraguan dalam menilai apakah ruas tersebut termasuk di dalam kawasan perkotaan atau bukan perkotaan/ perdesaan.

Oleh karena itu kasus yang ada pada dukuh Kalisari terjadi adanya Dinas yang terkait tidak memahami peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan di tindak secara sepihak.



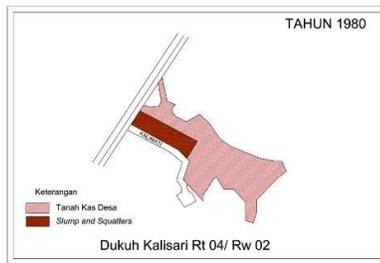
Gambar 4. Penampakan Dukuh Kalisari dari atas jembatan (sumber : data pribadi)

Perkembangan Slump dan Squatters Tahun 1979 - 2019



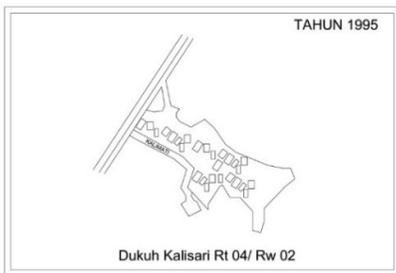
Gambar 4.5 Dukuh Kalisari Tahun 1979
 Sumber : Autocad (data pribadi), Tahun 2021

Bermula pada tahun 1979 yang awalnya merupakan tanah kas desa Banyudono yang bersih akan bangunan dan berfungsi sebagai bantaran sungai pada mestinya.



Gambar 4.5 Dukuh Kalisari Tahun 1980
 Sumber : Autocad (data pribadi), Tahun 2021

Pada tahun 1980 dari Dinas Sosial Boyolali menawarkan bantuan untuk di buatkan rumah bagi para para Gelandang dan Pengemis.

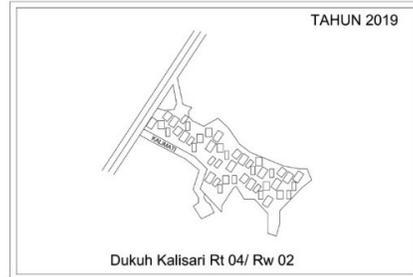


Gambar 4.5 Dukuh Kalisari Tahun 1995
 Sumber : Autocad (data pribadi), Tahun 2021

Terjadi lonjakan yang cukup tinggi dimana pada tahun 1995 bertambahnya rumah liar yang di bangun.



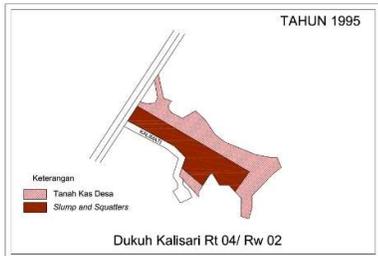
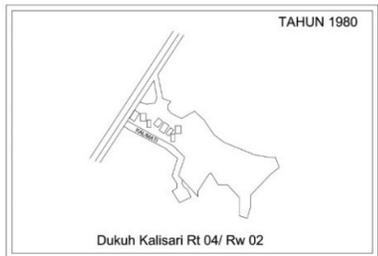
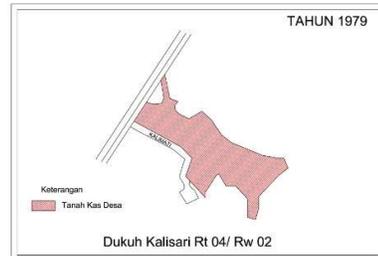
Gambar 4.5 Dukuh Kalisari Tahun 2015
 Sumber : Autocad (data pribadi), Tahun 2021
 Tahun 2015 pemukiman di sekitar bantaran sungai terus berkembang dengan pesat, sehingga kini menjadi sebuah kawasan sendiri yang saat ini dikenal dengan dukuh Kalisari.

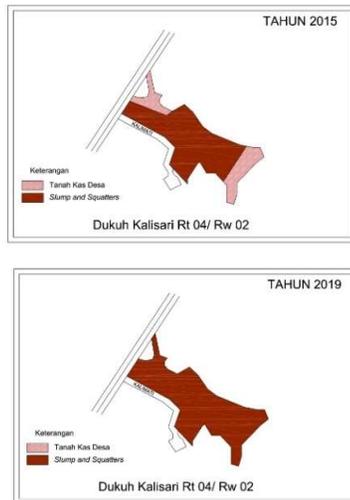


Gambar 4.5 Dukuh Kalisari Tahun 2019
 Sumber : Autocad (data pribadi), Tahun 2021

Pada tahun 2019 area sekitar 700 m2 telah menjadi pemukiman yang padat dan tak terkendali.

Morfologi Slump dan Squatters Tahun 1979 - 2019





**Gambar 4.5 Morfologi Slump and Squatters
Dukuh kalisari Tahun 1979- 2019
Sumber : Autocad (data pribadi), Tahun 2021**

Bentuk morfologi *slump* dan *Squatters* pada kasus desa Kaligoro yaitu berbentuk Linear, hal ini dapat di lihat pada gambar di atas berkembang terus pada tiap tahunnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya disimpulkan bahwa Slump dan Squatters desa Banyudono berpengaruh kurang baik dari berbagai aspek, disebabkan masalah Slump dan Squatters yang ada di dukuh Kaligoro desa Banyudono. Hal ini terjadi kesalaham kebijakan pemerintah Boyolali dalam menangani hal tersebut. Pemerintah daerah Boyolali tidak akan menduga akan terjadi hal yang demikian. Pemanfaatan lahan terus di lakukan oleh warga yang berdatangan dari daerah lain hingga lahan tersebut sekarang menjadi pemukiman kumuh. Faktor keselamatan juga sangat berpengaruh bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Kalimati maupun masyarakat sekitar. Bahkan dalam hal moral juga sangatlah buruk untuk masyarakat sekitar dukuh Kaligoro.

Lambat laun dari waktu kewaktu semakin padat di dukuh Kaligoro yang menyebabkan lahan untuk bantaran sungai tersebut telah habis.

DAFTAR PUSTAKA

Prastyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Semarang: UNDIP.

Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Mentri, P.U. P. R (No.28 Tahun 2015). *Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.*

Undang-undang, R.I (No 1 tahun 2011). *Perumahan dan Kawasan Permukiman.*

Bungin, Burhan, 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komuniasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Perdan Media Grup, Jakarta.